

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
IZIN PRINSIP PENDIRIAN SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (SMA)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Ijin dari Ketua Yayasan
2.	Proposal Permohonan Ijin Prinsip
3.	Scan Asli Akta Notaris tentang pendirian Yayasan/Lembaga Penyelenggara Sekolah
4.	Pengesahan SK Yayasan dari Kemenkum dan HAM
5.	Surat Rekomendasi/Usulan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan *)
6.	Susunan Pengurus Yayasan/Lembaga Penyelenggara Sekolah (Terdiri dari SK, Susunan Pengurus yayasan dan Uraian Tugas)
7.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Penyelenggara tentang Pendirian Sekolah
8.	Profil Sekolah
9.	Hasil Analisis Studi Kelayakan pendirian SMA
10.	Surat Rekomendasi Khusus dari Kementerian Agama dan MUI minimal tingkat kecamatan (Khusus bagi SMA yang berbasis pesantren)
11.	Izin Lokasi dari Lembaga OSS
12.	Surat Pernyataan akan mentaati perundang-undangan yang berlaku (bermaterai)
13.	Surat Pernyataan tidak akan/sedang menempati atau menggunakan fasilitas pemerintah, rumah kantor (rukan), rumah toko (ruko), dan tidak berada pada lingkungan pusat keramaian atau lahan bermasalah (bermaterai)
14.	Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa data-data sesuai dengan kondisi aslinya (bermaterai)
15.	Surat Keterangan tentang penggunaan kurikulum yang akan dipakai (Diverifikasi pada saat komitmen)
16.	Surat tidak keberatan dari SMA terdekat yang berada dalam satu Desa/Kelurahan atau Kecamatan (minimal 3 SMA)
17.	Surat dukungan dari organisasi profesi di wilayahnya (minimal 3 organisasi): BMPS, PGRI, MKKS SMA dll.
18.	Memiliki Tanah/lahan sekolah minimal 2.000 m2 (Lahan yang diajukan harus pada lokasi/hamparan yang sama) (dibuktikan dengan Scan Asli Sertifikat / Akta Jual Beli)
19.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS (Online Single Submission)
20.	Memiliki bukti kepemilikan/status tanah (wakaf dan hibah) (Scan Asli)

21.	Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)/ Rencana Strategi (Renstra)/Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM)/School Bussines Plan (SBP) *) (Dibuat untuk 4 - 5 tahun)
22.	Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Program Kerja Sekolah (PKS) tahun berjalan (Tahun Pelajaran pada saat mengajukan ijin)
23.	Surat dukungan dari pejabat tingkat kecamatan (muspika) setempat (Camat, Kapolsek, Danramil.)
24.	Memiliki dokumen I (KTSP) (Diverifikasi pada saat komitmen)
25.	Memiliki dokumen II (Silabus) (Diverifikasi pada saat komitmen)
26.	Surat dukungan/ tidak keberatan dari warga sekitar sekolah (minimal 20 orang warga: ada tanda tangan dan FC KTP (diketahui oleh Ketua RT, RW dan Lurah/Kepala Desa)
27.	Surat Pengangkatan Kepala Sekolah/Guru (kualifikasi S1/DIV) yang diberi Tugas sebagai Kepala Sekolah (SK Pengangkatan, Ijasah dan Curriculum Vitae)
28.	Surat Keputusan Pengangkatan Guru yang dilengkapi dengan Ijasah dan akta mengajar/sertifikat pendidik (SK Pengangkatan, Ijasah dan akta/sertifikat pendidik)
29.	Rekap data Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilengkapi dengan Pendidikan dan tugas masing - masing
30.	Memiliki Kepala Sub Bagian Tata Usaha (1 orang berijazah minimal D-II) (SK Pengangkatan dan Ijasah)
31.	Memiliki Caraka/Pesuruh/Satpam minimal 1 orang dengan kualifikasi pendidikan minimal SMP (SK Pengangkatan dan Ijasah)
32.	Memiliki ruang kelas/teori dengan luas minimal 63 m2 (minimal 80 % dari jumlah rombel yang akan dibuka)
33.	Memiliki Laboratorium Komputer/Bahasa/IPA (Kimia, Fisika dan Biologi) dengan ukuran min 72 m2
34.	Memiliki Perpustakaan dengan ukuran standar
35.	Memiliki meubelair untuk Kepala Sekolah, guru, tata usaha dan siswa dengan perbandingan 1 : 1.
36.	Memiliki sarana penunjang, dengan ukuran yang standar : a. Ruang Kepala Sekolah b. Ruang Guru c. Ruang Tata Usaha d. Toilet e. Asrama / Pondokan bagi SMA berasrama / Ponpes f. Ruang Ibadah (mesjid/musola, dll)  (dokumntasikan dalam 1 file PDF) (Khusus bagi SMA yang berbasis pesantren)
37.	Memiliki rekening Bank untuk keperluan operasional sekolah atas nama yayasan
38.	Memiliki Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) untuk tahun pelajaran berjalan (memenuhi kebutuhan 8 SNP)
39.	Memiliki dana operasional untuk pengembangan sekolah sesuai dengan kebutuhan 8 SNP minimal 1 tahun berjalan (Saldo bank minimal 60 % dari total anggaran pada RKAS)
40.	Data lulusan SMP/MTs yang tidak diterima di SMA/MA/SMK dalam 1 kecamatan/kabupaten/kota (3 tahun terakhir)
41.	Surat Keterangan atau MOU Menginduk ke SMA terdekat yang sudah Ter-Akreditasi
42.	Scan Asli Surat Keputusan Perangkat Pengelola Sekolah (Wakasek/Wali Kelas, dll) (SK Pengangkatan, dan akta/sertifikat pendidik)
43.	Surat Tugas/Kuasa dari Yayasan Penyelenggara untuk mengurus Ijin Operasional kepada Kepala Sekolah/Wakasek